

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pemerintahan di Indonesia terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kedua jenis pemerintahan tersebut memerlukan tata kelola keuangan yang baik dan bertanggungjawab. Pengelolaan tata pemerintahan keuangan yang baik, memerlukan kewenangan secara jelas dan konsisten. Salah satu upaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang bertanggungjawab, pemerintah daerah wajib membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut Mardiasmo (2009) tata kelola pemerintahan yaitu suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik kepada pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik membutuhkan berbagai usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan horizontal (Rusdiana dan Nasihudin 2018). Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanat

untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat baik secara vertikal maupun secara horizontal (Rusdiana dan Nasihudin 2018).

Tata kelola pemerintahan yang baik salah satunya diwujudkan dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah dengan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat (SAP). Hal tersebut bertujuan memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah (Hasibuan 2015). Standar akuntansi pemerintah (SAP) yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan yaitu memberikan informasi mengenai posisi pelaporan keuangan, kinerja keuangan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi (PSAK No. 1 Tahun 2015).

Menurut Roviyantie (2011) laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas, dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah daerah harus memiliki kemampuan menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan harus menyajikan informasi keuangan yang berkualitas dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010) tentang Standar Akuntansi Pemerintah, menjelaskan bahwa laporan keuangan pemerintah dapat dikatakan berkualitas apabila laporan tersebut bersifat; (1) relevan yaitu apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna ataupun manajerial, (2) andal yaitu informasi harus disajikan secara jujur dan adanya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi, (3) dapat dipahami, apabila

informasi yang disajikan mudah untuk dipahami pengguna laporan keuangan, (4) dapat dibandingkan, apabila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.

Menurut (Fatimah, 20120) <http://kominfo.jatimprov.go.id/> Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu daerah yang memiliki tata kelola keuangan yang baik keuangan yang baik. Dapat diraih salah satunya terkait sistem akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian intern yang sudah diterapkan dengan baik. Sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Pasal 10 menyatakan bahwa laporan keuangan disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pertanggung jawaban yang akan disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Asset Daerah (BPPKAD) merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi urusan penunjang pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan (Cahyono, 2020) [www.bppkad.go.id](http://www.bppkad.go.id). Maka dalam hal ini penelitian tertarik mengambil faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu dengan Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah menurut Permendagri No. 59 Tahun 2007 yaitu serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Pengelolaan keuangan daerah yang baik harus dilakukan dengan mewujudkan tujuan pemerintahan yang bersih. Pengelolaan keuangan daerah yang baik dilihat dari kemampuan mengontrol kebijakan

keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel (Yusniar dkk, 2017).

Pengelolaan keuangan yang baik dan bertanggungjawab membutuhkan suatu Sistem Pengendalian Intern dalam pelaksanaannya. Pengendalian intern harus diimplementasikan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat serta pelaksanaan sudah memiliki kewenangan dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan pengendalian tersebut secara efektif. Selain itu juga harus sesuai dengan tujuan dari dilaksanakannya pengendalian intern. Menurut Arens (2008:370) pelaporan keuangan yang dihasilkan memiliki kualitas yang andal, aset milik daerah tetap aman dan peraturan perundang-undangan harusnya tetap dijalankan sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 menyatakan bahwa pengendalian intern bisa tercapai dengan melaksanakan lima elemen pengendalian intern. Pertama, lingkungan pengendalian yang merupakan kondisi didalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Kedua, penilaian risiko yaitu kegiatan penilaian atas kemungkinan terjadinya ancaman pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Ketiga, kegiatan pengendalian yang merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan menatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Keempat, informasi dan komunikasi, Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan

umpan balik. Kelima, pemantauan yaitu proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.

Faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu kompetensi sumber daya manusia. Menurut Wibowo (2016) kompetensi adalah suatu kemampuan untuk mengerjakan atau melaksanakan suatu pekerjaan secara efektif. Kompetensi yang memadai akan mencapai kinerja tertinggi dalam menyelesaikan pekerjaannya. Setiap entitas pemerintahan membutuhkan sumber daya yang berkompeten untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor penting karena dalam menciptakan laporan keuangan yang berkualitas diperlukan sumber daya manusia yang mampu menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah (Nurhasanah dkk, 2018).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ansir (2021), hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Mutmainnah (2020), hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh yang signifikan berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Hana (2020), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah

daerah, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Nurul (2018), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia, dan pengendalian internal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Secara parsial, penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pemerintah daerah, kompetensi sumber daya manusia secara signifikan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan pengendalian internal secara signifikan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Mutia (2020), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari pengujian statistik menunjukkan adanya pengaruh kompetensi sumber daya manusia yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan, penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada BPKAD Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil pada penelitian terdahulu penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ansir (2021) Mutmainnah (2020) Hana (2020) Nurul (2018) Mutia (2020), yaitu terletak pada variabel independen dan wilayah objek penelitian yang digunakan. Penelitian Ansir (2021) menggunakan variabel independen penerapan sistem akuntansi pemerintah dan kualitas sumber daya manusia objek penelitian terletak di Kabupaten Gowa. Penelitian Nurul (2018) menggunakan variabel independen sistem akuntansi

keuangan daerah, kompetensi sumber daya manusia dan pengendalian internal objek penelitian terletak di Kota Tebing. Penelitian Mutia (2020) menggunakan variabel independent kompetensi sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintah dan pengendalian internal objek penelitian terletak pada BPKAD Provinsi Sumatera Utara. Penelitian Mutmainnah (2020) menggunakan variabel independent penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah objek penelitian terletak di Kabupaten baru. Penelitian Hana (2020) menggunakan variabel independen standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia objek penelitian terletak di Kota Tegal. Penelitian ini menggabungkan beberapa variabel independen yaitu sistem akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia dengan objek penelitian di BPPKAD Kabupaten Ponorogo.

Kualitas laporan keuangan sangat diperlukan didalam pemerintahan agar terhindar dari kecurangan, kekeliruan serta ketidaksesuaian laporan keuangan dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Hal tersebut juga didukung oleh sistem pengendalian intern yang baik dan kompetensi sumber daya manusia. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Di BPPKAD Kabupaten Ponorogo.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan perumusan diatas maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah sistem akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
3. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
4. Apakah sistem akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap laporan keuangan?

### **1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Menguji secara empiris pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan
- b. Menguji secara empiris pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan
- c. Menguji secara empiris pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan
- d. Menguji secara empiris pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia terhadap laporan keuangan

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

- a. Bagi Universitas

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah sehingga dapat dijadikan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan akuntansi pemerintahan.

b. Bagi BPKAD Kabupaten Ponorogo

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan dalam menyusun laporan keuangan serta memberikan gambaran mengenai pengaruh sistem akuntansi pemerintah, sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualita laporan keuangan.

c. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah sehingga dapat dilakukan melalui teori maupun praktek.

d. Bagi Peneliti Yang Akan Datang

Hasil penelitian ini di harapkan dapat dijadikan salah satu acuan atau sumber informasi yang dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.

